

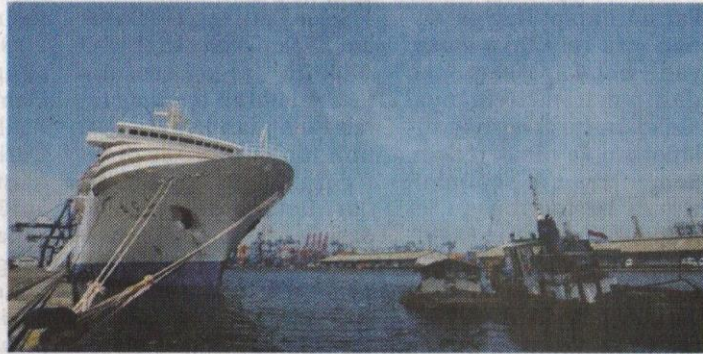
Polemik Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang

Pemkab Tidak Terima Deviden dan Takut Dicekal BPK

REMBANG - Derasnya laporan dari masyarakat yang mempertanyakan status pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang yang terkesan tidak transparan, memaksa Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz angkat bicara. Bahkan secara terang-terangan pihaknya membantah informasi bahwa Pemkab Rembang selama ini telah menerima deviden dengan jumlah yang sangat besar dari pengoperasian pelabuhan tersebut.

Hafidz mengatakan, absennya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang karena status regulasi perizinan pelabuhan setempat yang belum selesai, saalahsatunya kelayakan pelabuhan itu sendiri. Karena itu,

pemkab setempat tidak pernah mendapatkan sepeser pun retribusi dari pengoperasian pelabuhan tersebut. "Karena status periz-



DOC/JATENG POS

ILEGAL: Proses perizinan Pelabuhan Tanjung Bonang belum selesai, karena itu Pemkab Rembang tidak berani menerima deviden dari pengelolannya.

inan pelabuhan belum selesai, kami anggap masih ilegal dan tentunya pemerintah daerah tidak mau menerima pajak," ujar

Abdul Hafidz.

Jika pihak Pemkab Rembang menerima pajak pendapatan dari pengelolaan pelabuhan setempat, maka tentu saja pemkab setempat terancam terkena cekal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, kini pihaknya meminta seluruh instansi terkait agar segera menyelesaikan perizinan pelabuhan Tanjung Bonang.

Seperti diberitakan *Jateng Pos* sebelumnya, Komisi A DPRD Kabupaten Rembang menempatkan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang yang berada di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke sebagai objek pengawasan. Demikian sebagai tindak lanjut keluhan sebagian kelompok ma-

► Baca **POLEMIK...** Hal 12